

PANDANGAN ULAMA ORMAS ISLAM TERHADAP NASIONALISME DAN PERSOALAN KEKINIAN DI INDONESIA

Ahmad Zuhri, Syukur Kholil

Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Ormas Islam terhadap nasionalisme dan persoalan kekinian di Indonesia. Penelitian ini terkategori kepada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi secara kualitas, karenanya dalam laporan penelitian akan tersimpul temuan yang bersifat normatif kualitatif. Secara prinsip, Muhammadiyah dan NU memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Mahas Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Per satuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Muhammadiyah dan NU akan menjadi garda depan demokrasi di negeri ini. Muhammadiyah dan NU tidak mempertentangkan antara Islam dan Nasionalisme. Islam ataupun nasionalisme harus saling sinergi untuk keberlangsungan agama, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan adanya nasionalisme, umat Islam akan bersatu. Empat pilar nasionalis harus tetap diperkuat, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Muhammadiyah dan NU berpandangan bahwa paham yang menyimpang, seperti radikalisme, liberalisme dan yang sejenis, atau paham yang bertentangan dengan ideologi Nasional Indonesia tidak akan tumbuh subur jika nasionalisme diperkuat dan diperkokoh oleh semua komponen bangsa.

Kata Kunci : Ulama, Ormas Islam, Nasionalisme dan Indonesia

Pendahuluan

Pada saat pembubaran HTI sempat menimbulkan pro-kontra dan polemik di tengah masyarakat. Ketegasan Pemerintah untuk membubarkannya ternyata penuh dukungan, misalnya Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan; “Gerakan Pemuda Anshor memberikan apresiasi atas ketegasan sikap pemerintah dalam membubarkan HTI,” demikian juga Ketua PB IKA PMII Zaini Rahman memuji langkah pemerintah terkait pembubaran HTI. Menurut dia, langkah itu adalah bentuk ketegasan pemerintah dalam mengantisipasi berkembangnya gerakan-gerakan fundamentalisme Islam.

Di sisi lain, ada banyak penentangannya, misalnya; Ketua Dewan Penasihat Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Hisar Tambunan ingin menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadikan dasar dalam pembubaran HTI, demikian juga Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa pengamat politik mengatakan Intinya kami tetap melakukan perlawanan dan mohon MK membatalkan seluruh isi Perppu. Ini menggambarkan bahwa bukan hanya kelompok nasionalis yang banyak, tetapi kelompok kontra produktif juga banyak.

Ada banyak persoalan penting kekinian terkait dengan Ulama Ormas Islam. Selain adanya kekhawatiran akan tercabik-cabik integrasi bangsa, juga militansi nasionalisme warga negara. Misalnya; 1). Lahirnya Pendapat dan sikap keagamaan MUI (Fatwa MUI) atas ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, yang ditindak lanjuti oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) yang berakhir dengan dicopotnya sebagai Gubernur DKI serta dipenjarakan. 2). Unjuk rasa damai 212 dan yang lainnya. 3) Isu PKI, yang telah bergojolak sampai kepada Penyerangan kantor LBH atas kekhawatiran bangkitnya kembali PKI., dan lain-lain. Semua ini mengindikasikan betapa rawannya nasionalisme bangsa kita sekarang ini.

Peristiwa peristiwa kekinian seperti dijelaskan di atas sering muncul dalam bentuk yang ambigu (abu-abu). Apakah peristiwa itu bagian dari ajaran agama dimana kita akan beribadah saat melaksanakannya sehingga kita akan menjadi orang saleh dengannya, atau termasuk manuver politik yang ingin mengganggu integrasi kita dalam berbangsa dan bernegara sehingga kita telah bersifat provokatif terhadap nasionalisme, bahkan bisa dituduh makar. Kenyataan ini menjadi tanda tanya, karenanya perlu ada ketegasan.

Mencermati akan keterpengaruhan ulama dua ormas terbesar di Indonesia yaitu, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) pada even-even besar belakangan ini mengundang kita untuk mempertanyakan nasionalisme mereka.

Hal ini menjadi teramat penting untuk diteliti dalam sebuah penelitian serius karena berkenaan dengan nasib 250.000.000, anak bangsa dan sebagai bangsa terbesar ke-4 di dunia, dan nomor satu terbanyak penganut Islamnya di dunia. Juga mesti segera ditangani karena jangan sampai terlambat dengan ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengganti ideologi negara Indonesia, sebab sudah ada ormas yang dibubarkan sebagai kekuatan yang mengancamnya, bahkan jangan sampai Indonesia menjadi negara ateis karena PKI telah menggeliat dengan manuver dan strateginya.

Sikap dan Pandangan Ulama Muhammadiyah terhadap Nasionalisme dan Persoalan kekinian

Muhammadiyah memandang bahwa cita-cita nasional sebagai mana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kristali sasi dari jiwa perjuangan bangsa sebelum maupun sesudah kemerdekaan, yang sekaligus merupakan cita-cita Indonesia Berkemajuan. Konsep Indonesia berkemajuan memiliki semangat yang sama dengan ungkapan “memajukan kesejahteraan umum” yang mengandung nilai kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan keberadaan. Pendeknya adalah kondisi yang lebih baik.¹ Selanjutnya Muhammadiyah membe rikan penjelasan tentang arti dan makna berkemajuan.

Dapat dikatakan bahwa maksud dari berkemajuan adalah mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin di semua bidang kehidupan-material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan, dan bahkan *progress*, sebagai perwujudan daari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).²

Kaitannya dengan agama, dalam hal ini Islam, maka Muhammadiyah menegaskan bahwa agama merupakan ajaran yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Agama sebagai sumber nilai utama yang fundamental berfungsi sebagai kekuatan transendental yang luhur dan mulia bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai intrinsik keagamaan telah memberi inspirasi bagi para pendiri bangsa dan perumus cita-cita negara dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berbasis pada ajaran agama. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara.³ Bahkan agama bukan hanya kumpulan tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang terkandung dalam ajaran kitab suci, lebih dari itu, agama merupakan model perilaku yang tercermin dalam tindakan nyata yang mendorong penganutnya memiliki watak jujur dan dipercaya, dinamis, kreatif dan kerkemajuan. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang Maha Pencipta (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur dan memberi arah kehidupan dalam hubungan antar umat manusia (*habl min al-nas*) yang membentuk peradaban hidup yang utama.⁴ Hal ini ada ditegaskan dalam Alquran surat Ali Imran/3:112:

**ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ...**

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kemiskinan/kesengsaraan.

Ayat di atas lebih menegaskan bahwa jika tidak berpegang teguh pada agama yang hubungannya (ibadah) kepada Allah (*habl min Allah*), serta hubungan atau perjanjian dengan manusia, yang merupakan norma atau hukum yang sudah disepakati sesama manusia, jika kedua hal ini dilanggar, maka sangsinya ada 3 hal, yaitu manusia tersebut akan diliputi kehinaan di mana saja ia berada, kedua, Allah akan murka, dan ketiga akan mendapat kesengsaraan. Jadi, esensinya mesti memiliki hubungan yang baik kepada Allah swt dan hubungan yang baik pula kepada sesama manusia.

Berdasarkan hal di atas, maka agama bagi kehidupan bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber nilai kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya alam secara cerdas dan bertanggungjawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal lain yang membawa pada kemajuan hidup bangsa. Nilai-nilai agama juga dapat mengembangkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang adil tanpa diskriminasi, serta hubungan antara umat manusia yang berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai agama itu bangsa Indonesia dapat menjalani kehidupan di abad modern yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat.⁵

Jadi, bagi Muhammadiyah, Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia merupakan agama yang mengandung ajaran-ajaran tentang kemajuan (*din al-hadharah*), yang berwatak progressif dan sesuai dengan alasan pikiran masyarakat moderen. Karenanya Islam dapat menjadi sumber nilai yang penting dan utama bagi usaha-usaha membangun kehidupan kebangsaan, atau nasionalisme, menuju Indonesia berkemajuan.

Muhammadiyah menawarkan dalam hal mengokohkan nasionalisme di Indonesia yang berkualitas dan berkemajuan lewat nilai-nilai agama salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan yang profetik. Kepemimpinan yang profetik adalah memiliki kualitas ruhaniah yang memadukan keseimbangan hubungan dengan Tuhan (Allah swt) dan dengan sesama umat manusia serta lingkungannya untuk membangun peradaban hidup yang utama. Setidaknya ada 7 kriteria yang mesti dimiliki dalam kepemimpinan profetik, yaitu:

- 1) Relijius, kata sejalan dengan tindakan dan bertanggung jawab.
- 2) Visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa (nasionalis) dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroni.
- 3) Berani mengambil berbagai keputusan strategis dan memecahkan masalah-masalah krusial bangsa.
- 4) Mewujudkan *good governance*, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, serta penyematan aset dan kekayaan negara.
- 5) Menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan di luar negeri.
- 6) Melepaskan jabatan partai politik dan fungsi-fungsi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu jalannya pemerintahan dalam memimpin bangsa dan negara.
- 7) Memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemenangan bangsa.⁶

Dari penjabaran karakter kepemimpinan profetik di atas, maka para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan mesti memiliki dan menjunjung tinggi kebenaran (*siddiq*), kejujuran dan bertanggung jawan (*amanah*), menyampaikan kebenaran secara transparan (*tabligh*), dan cerdas dalam mengelola aset negara (*fathanah*). Selanjutnya, para pemimpin mesti menunjukkan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keteladanan elit menjadi kunci penting bagi tumbuhnya kepercayaan sebagai pusat identifikasi diri bagi rakyat, serta menjadi modal sosial dan ruhaniah yang berharga untuk kemajuan bangsa.

Muhammadiyah berkaitan dengan nasionalisme di Indonesia telah membuat keputusan khusus yakni pada Khittah Muhammadiyah tahun 2002, yaitu Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah berpaandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah akhlak dan *mu'amalah dunyawiyah* yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misingerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini. Muhammadiyah menegaskan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar makruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.⁷

Selanjutnya Khittah Denpasar tahun 2002 atau Khittah Muhammadiyah dalam Berbangsa dan Bernegara yang bersifat lengkap itu berisi sembilan butir pernyataan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyah*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama.
2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*".
3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis

dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.

5. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranannya sebagai wujud dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
6. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlaq al-kari mah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah *amar ma'ruf nahi munkar*.
9. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.⁸

Demikian pandangan Muhammadiyah tentang nasionalisme yang dikaitkan dengan agama. Kemudian, jika menelaah dalam sejarah maka Paparan Benni Setiawan dalam Nasionalisme Muhammadiyah, mengutip perkataan Muarif bahwa terbagi menjadi tiga periode dalam proses nasionalisme Muhammadiyah yaitu pertama pada masa Kyai Ahmad Dahlan nasionalisme dimaknai sebagai konteks persatuan. Zaman kedua masa Kyai Ibrahim Nasionalisme berarti Indonesia, sedangkan terakhir pada zaman Kyai Mas Mansur penerjemahan nasionalisme adalah semangat patriotik.⁹

Selanjutnya dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Bahwa Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Sejak awal Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang final dan mengikat seluruh komponen bangsa dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai dengan ayat Alquran Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menjadi panduan Muhammadiyah dalam bermua malah kepada siapapun, tidak saja kepada sesama warga Muham madiyah, sebangsa dan setanah air, bahkan pada masyarakat dunia untuk saling kenal mengenal. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah bersaudara, yang dalam Islam dikenal dengan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah* atau *ukhuwah insaniyah*).

Oleh karena itu, menurut salah seorang tokoh Muham madiyah Sumatera Utara Ustaz Irwansyahputra,¹⁰ Muham madiyah sudah teruji dalam perjalanan sejarah bangsa Indo nesia, kontribusinya dalam me wujudkan dan mengokohkan nilai-nilai nasionalisme, tak terbantahkan oleh siapapun yang berminat meneliti tentang Muhammadiyah. Lewat amal usaha Muhammadiyah dengan jalur pendidikan, Muhammadiyah menyelenggarakannya secara terbuka untuk bangsa Indonesia, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sehingga terkadang sekolah-sekolah Muhammadiyah murid atau pelajarnya lebih banyak yang beragama non-Muslim ketimbang Muslim, hal ini dapat di lihat di propinsi paling ujung Indonensia, yakni Papua. Sikap keberagamaan Muhammadiyah yang enklusif inilah membuat Muhammadiyah bisa diterima semua pihak termasuk non-Muslim. Jadi, paham agama Muhammadiyah sangat mendukung kokohnya nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan kokohnya nasionalisme bangsa Indonesia diharapkan akan mewujudkan bangsa yang mandiri dalam segala hal, terutama dalam memenuhi kebutuhan primer rakyatnya, jadi kita tidak sangat tergantung dengan bangsa lain dalam hal pemenuhan kebutuhan primer.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA,¹¹ bahwa Muhammadiyah sangat kaya gagasan-gagasan yang segar untuk memajukan negara Indonesia dan menguatkan nasionalis me bangsanya. Hal terbukti dengan banyaknya amal usaha Muhamma diyah dalam berbarbagai bidang, dari mulai dari pendidikan telah terbangun ribuan TK, SD/MDI, SMP/MTs dan SMU/MA dan ratusan Perguru Tinggi, kesehatan dengan hadirnya rumah sakit Muhammedi yah di setiap propinsi, panti asuhan, serta amal usaha di bidang ekonomi. Itu semua adalah dalam rangka membangun bangsa yang berkemajuan dan menmgokohkan nasionalisme. Dorongan dan motivasi dilakukan hal tersebut, tidak lain adalah dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, karna Muhammadiyah didirikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Alquran dan *as-sunnah al-maqbulah*.

Selanjutnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir selalu mengingatkan bahwa gerakan radikalisme di Indonesia merupakan ancaman yang dapat hadir kapan saja, dalam bentuk apapun dan dengan model yang berbeda-beda. Tujuannya merusak semangat kebangsaan atau nasionalisme yang sudah lama terbangun di bumi Indonesia. Jadi, "Radikalisme bukanlah milik sekelompok agama tertentu saja. Radikalisme itu bisa diperankan oleh kelompok manapun, dari latar belakang agama, sosial dan budaya manapun," tegas Haedar saat memberikan materi dalam seminar Pemikiran Perguruan Tinggi untuk Kebangsaan di Kampus Universitas Mercu Buana (UMB).¹²

Sikap dan Pandangan Ulama NU terhadap Nasionalisme dan Persoalan Kekinian

Nahdhatul Ulama (NU) juga memiliki pandangan yang hampir sama dengan Muhammadiyah. Hanya saja NU, yang dalam berbagai gerakannya tentu sarat dengan kaum ulama, karena ormas ini awalnya adalah kumpulan para ulama atau kiyai, sehingga ketika ada sesuatu yang mesti diselesaikan maka para ulamanyapun akan berkumpul untuk membicarakannya. Kaitannya dengan nasionalisme, NU telah mengawalinya dengan sikap heroiknya dalam rangka nasionalisme memper tahankan negara RI yang baru saja merdeka ingin dijajah kembali oleh Belanda. Belanda pada waktu itu membonceng tentara sekutu. Maka, K.H.Hasyim Asy'ari atas nama Pimpinan PB NU, pada tanggal 22 Oktober 1945 mendeklarasikan seruan *jihad fi sabilillah*, yang dikenal dengan Resolusi Jihad. Setidaknya ada 3 (tiga) poin penting dalam resolusi Jihad, yaitu (1) setiap Muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangan kemerdekaan Indonesia. (2) pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. (3) warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional sehingga harus dihukum mati.¹³

Untuk menjaga eksistensi sekaligus memelihara kesinambungan peradaban bangsa Indonesia, agama dan nasionalisme tidak boleh dipisahkan karena keduanya merupakan faktor kunci yang sangat vital, demikian kata seorang petinggi Nahdhatul Ulama (NU), K.H.Maman Abd. Ghani.¹⁴ Lebih lanjut, beliau mengatakan “Apabila pemahaman bahwa agama dan nasionalisme merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan sudah mengakar dalam suatu bangsa maka tidak akan ada perang maupun kekerasan atas nama apa pun”.¹⁵

Nahdhatul Ulama telah berusaha menghilangkan ketegangan antara agama dan budaya, yang selanjutnya menjadikan perjuangan Islam menjadi substantif. Oleh karenanya syariat Islam diwujudkan dengan mengutamakan pada tujuan (*maqashid al-syari'ah*) dan prinsip dasarnya (*mabadi' al-syari'ah*). Esensi inti nilainya terdapat pada kemaslahatan serta moderatisme (*wasathiyah*) yang memungkinkan NU mewujudkan cita bukan dari idealisme, melainkan realisme. maknanya, untuk mewujudkan tujuan syariah, kaum tradisionalis ini berangkat dari realitas, baik realitas budaya maupun kenegaraan Indonesia. Ini yang membentuk Islam Nusantara yang menjadi basis-struktur bagi supra-struktur Islam Indonesia.

Berdasarkan itu, maka wacana Islam Nusantara mengindikasikan proses kembali ke akar nasionalisme NU karena corak kebangsaan organisasi ini dibentuk oleh pendekatan dakwahnya yang bersifat sosio-kultural. “Yang kultural” ini berbasis pada corak keislaman Nusantara. Sebagaimana KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan bagus mendefinisikan corak sosio-kultural NU ini. Menurut beliau, gerakan NU bersifat sosial karena beliau menginginkan perubahan struktur sosial menuju masyarakat berkeadilan. Namun, berbeda dengan gerakan sosio-politik yang memakai strategi politik (pendirian Negara Islam), NU menggunakan strategi kultural melalui dua langkah. *Pertama*, titik tekan atas nilai-nilai budaya masyarakat. *Kedua*, menggunakan modal budaya masyarakat terutama komunitas, lembaga dan asosiasi kulturalnya. Hal ini dilakukan Gus Dur melalui gerakan pengembangan masyarakat berbasis pesantren dekade 1980. Dalam hal ini, pesantren adalah modal budaya masyarakat yang dijadikan basis pengembangan ekonomi berdasar nilai-nilai Islam yang berkembang di pesantren.

Nasionalisme NU memang dibentuk di dalam Mukta Mar atau Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. *Pertama*, pengakuan wilayah Nusantara sebagai *dar al-Islam* (wilayah Islam) pada Mukta Mar ke-11 di Banjarmasin (1936). Ini *mafhum* diketahui, di mana NU menetapkan wilayah Nusantara yang saat itu dikuasai pemerintah kolonial Belanda, sebagai *dar al-Islam*. Pemaknaan *dar al-Islam* bukan sebagai negara Islam (*daulah Islamiyyah*), melainkan wilayah Islam, telah menumbuhkan nasionalisme karena NU mengawali Nusantara sebagai tanah kaum Muslim. Karena status keislaman ini, Hadhratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Membela tanah air dari penjajahan, *fardlu 'ain* hukumnya.

Kedua, afirmasi atas pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia, bukan negara Islam. Ini terjadi pada keterlibatan Kiai Wahid Hasyim pada Sidang BPUPKI-PPKI 1945. *Ketiga*, penahbisan Presiden Republik Indonesia (RI) sebagai pemimpin dalam keadaan darurat yang memiliki otoritas (*waly al-amri al-dlaruri bi al-syaukah*) melalui Munas Alim Ulama di Cipanas (1954). Disebut darurat, karena presiden RI tidak sepenuhnya sah menurut fikih Sunni, sebab tidak memenuhi syarat sebagai khalifah dunia Islam. Namun secara konstitusional, ia memiliki kekuasaan sehingga sah menerapkan syariah Islam, terutama penunjukan wali hakim dalam pernikahan Muslim. Melalui penahbisan ini, pemerintah RI sah secara *syar'i*. *Keempat*, pembelaan Demokrasi Pancasila sebagai pilihan otentik dibanding Demokrasi Terpimpin, liberal dan komunis pada Mukhtamar ke-24 di Bandung (1967). *Kelima*, penerimaan atas Pancasila pada Munas Alim Ulama di Situbondo (1983). Serta keenam, Maklumat Penyelamatan NKRI dan Pancasila dari fundamentalisme agama dan pasar pada Harlah ke-85 NU (2011).

Seluruh fase kebangsaan ini terhenti pada legitimasi Islam atas nasionalisme dalam rangka bentuk negara. Hal ini bisa dipahami sebab NU berkepentingan menjaga NKRI dari delegitimasi radikalisme Islam. Akan tetapi di masa ketika reformasi politik telah berjalan meninggalkan nasionalisme paska-kolonial; nasionalisme NU perlu diperbarui demi demokratisasi yang makin substantif. Untuk hal ini perlu dilakukan beberapa hal.

Pertama, pendalaman nasionalisme menuju apa yang Soekarno sebut sebagai sosio-nasionalisme. Dalam kerangka ini, nasionalisme bukan hanya pembelaan atas bangunan negara-bangsa. Melainkan perwujudan tujuan pendirian negara yang oleh Pancasila diarahkan menuju keadilan sosial. *Kedua*, transformasi pemikiran politik Sunni klasik, menuju politik NU yang berpijak pada konsep politik kontemporer. Ini sebenarnya potensial, sebab pendekatan *maqashid al-syari'ah* menempatkan politik sebagai *res publica* (kebaikan publik). Dengan potensi ini, pemikiran politik NU sejajar dengan teori republikanisme, yang membangkitkan kembali ontologi politik di tengah demokrasi prosedural manipulatif. Pada titik ini, Mukhtamar ke-33 tahun 2015, sebenarnya menawarkan warna baru dalam tradisi demokrasi melalui pemilihan Rais Aam berdasarkan musyawarah dewan ulama tertinggi (*ahlul halli wal 'aqdi*). Ini dilakukan untuk menghindari politisasi yang terjadi dalam pemungutan suara (*voting*). Dengan demikian, NU telah mengawali transformasi demokrasi dari majoritarianisme kepada *syura* (musyawarah). Satu hal yang diidealkan oleh prinsip permusyawaratan Pancasila.

Kendatipun warna baru demokrasi di kalangan *nahdliyin* ini akan terhenti pada pemilihan pemimpin (*nashb al-imamah*), jika tidak dibarengi dengan pendalaman nasionalisme di atas. Dua agenda mendasar menanti. *Pertama*, penguatan etos kewarganegaraan, terutama di kalangan umat Islam. *Kedua*, radikalisasi demokrasi dalam bentuk penguatan demokrasi partisipatoris menuju perwujudan *res publica*. Jika tidak, nasionalisme NU hanya terhenti di mimbar dakwah, namun abai dengan ketidakadilan struktural yang menjadi nasib keseharian negeri ini.

Berdasarkan pandangan Ketua Umum PB NU K.H. Said Aqil Siraj, beliau mengemukakan bahwa kiai-kiai pesan tren di Indonesia telah berhasil membangun jembatan antara prinsip agama dan negara, berbeda dengan kondisi di Timur Tengah yang ia nilai tidak memiliki konsep titik temu antara agama dan negara, antara Islam dan prinsip kebangsaan. "Konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak akan selesai jika belum ada titik temu antara prinsip agama dan prinsip negara," demikian beliau komentar, lulusan Universitas Ummul Qura, Mekkah, Arab Saudi itu. Selanjutnya, beliau juga menegaskan, kesatuan antara agama dan nasionalisme di Indonesia telah menjadi perhatian bangsa asing yang ingin memecah bangsa Indonesia sejak dahulu "Kita masih ingat, kaum penjajah melakukan berbagai upaya untuk memisahkan antara Islam dan

nasionalisme. Dan hal ini ingin dilakukan lagi oleh pihak-pihak yang tidak mau melihat bangsa kita kuat dan maju,” katanya.

K.H.Said Aqil Siraj juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya yang bergama Islam, untuk meneladani pemikiran pendiri NU Hadratussyaikh, KH Hasyim Asyari, dalam memahami kaitan antara agama dan nasionalisme. Asyari percaya bahwa kesatuan antara agama dan nasionalisme merupakan satu fondasi kokoh untuk menghadapi berbagai macam tantangan bangsa seperti kebodohan, keterbelakangan, serta ancaman perpecahan bangsa. Mengutip pernyataan Asyari, K.H.Said Aqil Siraj mengemukakan bahwa menegakkan agama dan nasionalisme merupakan salah satu kewajiban bagi mereka yang merasa mempunyai iman sebagai seorang Muslim.¹⁶

Menurut Pandangan NU, jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Di sinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Perjuangan melawan dan mengusir penjajah ditegaskan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai kewajiban agama atas seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang terjajah.

Pandangan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut tentu melihat masalah yang lebih luas, yakni kemerdekaan sebuah bangsa yang akan mengantarkan pada kemakmuran dan keadilan sosial. Tanpa didasari akan kesadaran membela tanah airnya, besar kemungkinan kolonialisme akan terus eksis di bumi pertiwi Indonesia.

Awalnya, ungkapan cinta tanah air yang dicetuskan Kiai Hasyim Asy'ari ini dikira hadits oleh sebagian orang, bahkan ulama-ulama di tanah hijaz (Mekkah dan Madinah), saking masyhurnya. Terlepas dari semua itu, apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim dan Asy'ari juga kontribusi ulama-ulama lain memberikan spirit nasionalisme tinggi. Tentu perjuangan ini harus diteruskan menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda saat ini.

Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani (1984) mendefinisikan hal ini dengan istilah *al-wathan al-ashli* yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan, “*Al-wathan al-ashli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.*”

Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal.

Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan *hubbul wathan minal iman*.

Konsekuensi, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentanginya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal

ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya.

Perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air mempunyai makna, Indonesia terdiri dari 700 suku lebih yang mempunyai tradisi, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Langkah kita sebagai seorang pelajar hendaknya berusaha mengetahui dan memahami kemajemukan Indonesia. Menjaga dan merawat Indonesia yang beragam ini merupakan bentuk cinta tanah air yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung KH Ahmad Ishomuddin (2018) mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam:

Pertama, cinta tanah air dalam al-Qur'an Q.S.An-Nisa'/4 : 66, Allah berfirman:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا.

“Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksana kan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), “

Menurut para ahli tafsir, khususnya dalam *Tafsir al-Kabir*, al-Imam Fakhir Al-Din al-Razi menafsirkan ayat di atas, *“Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri.”* Pernyataan al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam sangat dalam pada jiwa manusia.

Kedua, cinta tanah air perhatikan matan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَتَظَرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

(Ahmad-12162):Telah menceritakan kepada kami Ibrahim telah menceritakan kepada kami al-Harits bin 'Umair dari Humaid, at-thowil dari Anas, Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam jika tiba dari suatu perjalanan dan melihat ke dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat untanya dan jika diatas kendaranya, ditarik-tariknya, karena begitu cintanya kepada Madinah. H.R.Ahmad.

Penjelasan ulama pen-syarah-nya, sebagaimana yang dikomen tari dalam *Fath al-Bari*, oleh al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, *“Hadis atas menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkan nya cinta tanah air.”* Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab *‘Umdat al-Qariy* oleh Badr al-Din al-'Aini.

Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fiqih. Bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab *al-Dakhirah*, al-Qarafi menyatakan, *“Manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air.”* *Keempat*, cinta tanah air menurut para wali. Orang-orang

yang saleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab *Hilyat al-Awliya'*, Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah, Ibrahim bin Adham, ia berkata, “*Saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air.*”

Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya—dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya—juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memerhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya.

Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja. Bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa-bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpahkan darah, saling bunuh dan masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama, namun mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya. Itu semuanya terjadi karena kecintaan mereka pada agama yang tidak diiringi dengan kecintaan kepada tanah air yang juga merupakan tuntutan agamanya.

Peneliti ingin mengemukakan doa cinta tanah air yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim as, yaitu:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“*Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.*”

dalam firman Allah swt, QS.Al-Baqarah/ ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

“*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: (Rabbij’al hâdzâ baladan âminan warzuq ahlâhû minats tsamarâti man âmana minhûm billâhi wal yaumul âkhir.) “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”*”

Selain ikut berjuang merebut kemerdekaan, NU juga konsisten menjaga dan merawat kemerdekaan yang sudah sejak lama diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati bagi NU, sebagai salah satu bukti, bahwa NU mencintai tanah airnya, sebagaimana ia mencintai agamanya. Lebih lanjut, Nisful Khairi, salah seorang tokoh NU Sumatera Utara, mengemukakan bahwa Menjaga Islam dalam bingkai “Islam Nusantara” dan menjaga tanah air dalam bingkai “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI) merupakan dua

komitmen NU yang sampai hari ini masih dipegang teguh sebagai ijtihad perjuangan NU. Persoalan keummatan dan kebangsaan, bagi NU adalah dua entitas tak terpisahkan. Menjaga Islam berarti harus menjaga NKRI, sebaliknya, menjaga NKRI harus juga menjaga Islam (baca: Islam Nusantara).¹⁷

Hal yang senada tokoh NU Sumatera Utara lainnya, yakni Prof. Dr. Katimin, Mag,¹⁸ menjelaskan, bahwa menjaga Islam dalam bingkai “Islam Nusantara” dan menjaga tanah air dalam bingkai “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI) merupakan dua komitmen NU yang sampai hari ini masih dipegang teguh sebagai ijtihad perjuangan NU. Persoalan keummatan dan kebangsaan, bagi NU adalah dua entitas tak terpisahkan. Menjaga Islam berarti harus menjaga NKRI, sebaliknya, menjaga NKRI harus juga menjaga Islam (baca: Islam Nusantara).

Konsekuensinya, NU harus tegas dan berani melawan radikalisasi Islam dan ideologi asing yang pada dekade mutakhir mulai menunjukkan eksistensinya di negeri ini. Sebagaimana kita mafhum, radikalisme Islam (baca: kekerasan atas nama Islam) marak terjadi di negeri ini. Terbukti, hujatan bahkan tindak kekerasan atas nama agama terhadap kelompok yang berbeda acapkali terjadi belakangan ini. Misalnya, penyerangan terhadap para pemuka agama dan tempat-tempat ibadah.

Radikalisme yang lahir dari intoleransi, kian hari kian mengkhawatirkan dan menjadi momok yang menakutkan bagi terwujudnya Indonesia yang rukun dan damai. Dewasa ini, agama (baca: Islam) acapkali dijadikan alat legitimasi untuk melegalkan tindakan-tindakan kekerasan dan amoral lainnya. Islam lebih sering ditampilkan dengan wajah yang garang dan menakutkan, daripada wajahnya yang indah dan mendamaikan.

Tidak hanya radikalisme Islam, ideologi asing, sebut saja ideologi “*khilafah*” yang lahir dari rahim Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kian hari kian gencar dikampanyekan oleh para *hizbiyyin* sebagai satu-satunya ideologi yang abash dan halal diterapkan di dunia, khususnya di Indonesia.

HTI sangat mengecam diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia. Karena tujuan politik yang ingin dicapai oleh mereka adalah politik Islam *kaffah*, yaitu menerapkan syariat Islam secara utuh. Tidak hanya penerapan syariat Islam yang menjadi konsern perjuangan mereka, tetapi penegakan pemerintahan *khilafah* di negara-negara yang mereka sebut sebagai negara Islam, termasuk Indonesia.

Bagi HTI, demokrasi merupakan sistem kafir yang harus segera ditinggalkan oleh Indonesia. Karena ia merupakan produk barat. Dengan berlandaskan pendapat Taqiyuddin An-Nabani (pendiri Hizbut Tahrir), HTI berpendapat, bahwa kemunduran umat Islam disebabkan menjadikan Barat sebagai kiblat dari segala sistem kehidupan. Karena pokok persoalannya adalah barat, maka dia menyerukan kepada umat Islam dunia untuk meninggalkan sistem barat dan segera kembali kepada Islam sebagai dasar gerakannya.

Prof. Dr. Katimin, lebih lanjut mengemukakan bahwa Atas kegigihan melawan radikalisme Islam dan *Khilafah*, lantas kemudian NU dihujani banyak panah fitnah. Ia dituduh antek barat, pembela kaum kafir, liberal, penjilat, pragmatis, mata duitan, kejam terhadap sesama Islam dan santun terhadap non-Muslim dan fitnah-fitnah lainnya. Tapi sudah lah tidak usah dipikirkan, fitnah-fitnah itu sengaja mereka lancarkan untuk melemahkan perjuangan NU dan menggerus kepercayaan ummat terhadap NU. Bisalah, begitulah konsekuensi perjuangan. Maka dari itu, kita sebagai warga NU tidak boleh takut membelanya dari kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap perjuangannya. Karena membela NU juga berarti membela ulama. Sedangkan ulama itu *waratsatul anbiya*. Membela NU juga berarti membela agama dan negara. Atas nama agama dan negara, mari kita perangi radikalisme dan khilafah.

Menurut Pandangan NU, jika menelaah dalam sejarah Islam, radikalisme bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah doktrin dan ideologi, faktor eksternal adalah imperialisme atau persepsi imperialisme dan ketidakadilan yang merundung umat Islam. Narasi ini akan menggali sumber internal radikalisme dengan melacak akar doktrinernya pada paham salafi yang berkembang di

Timur Tengah sejak abad ke-12 M dan mengeras menjadi ajaran *salafi-jihadi* pada abad ke-20 M. Pengaruh ideologi salafi dan salafi-jihadi meluas hingga ke Indonesia dan menjadi tantangan terhadap kemajemukan dan kelangsungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) secara internal, radikalisme bermula dari doktrin kesempurnaan dan keserba-mencakup Islam (شمولية الإسلام). Islam sempurna, karena itu tidak perlu ditambah dan dikurangi. Ajarannya mencakup semua, karena itu tidak perlu mencari tuntunan dari luar Islam. Contoh terbaik dari kesempurnaan Islam adalah praktik kehidupan generasi *salafus shâlih*. Mereka adalah tiga generasi terbaik dalam rentang tiga abad sejak zaman Nabi dan Sahabat, Tâbi'în, hingga Tâbiu't Tâbi'în. Sahabat adalah mereka yang bertemu Nabi dan mengakui risalahnya. Tâbi'în adalah mereka yang tidak bertemu Nabi tetapi bertemu Sahabat. Tâbiu't Tâbi'în adalah mereka yang tidak bertemu Nabi dan Sahabat tetapi bertemu dengan Tâbi'în. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

(al-Bukhari-2458): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Ubaidah dari 'Abdullah ra. dari Nabi saw. bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang setelah mereka kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian akan datang sebuah kaum yang per saksi seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya". Ibrahim berkata; "Dahulu, mereka (para sahabat) mengajarkan kami tentang bersaksi dan memegang janji (Mereka memukul kami bila melanggar perjanjian dan persaksian) ".H.R.al-Bukhari.

Dengan terlibatnya para santri, ulama dan kiai dalam gerakan Nasional, menunjukkan bahwa hubungan antara agama (Islam) dan paham kebangsaan di Indonesia sudah selesai dan final. Bagi umat Islam Indonesia, nasionalisme adalah cerminan dari ajaran Islam dan menjadi sarana untuk mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan agama adalah sumber inspirasi dari nasionalisme (KH Saifuddin Zuhri, 1965). Spirit inilah yang dirumuskan KH Hasyim Asy'ari dalam statemen yang sangat terkenal, *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air sebagian dari iman).

Sikap dan pemahaman seperti inilah yang membuat umat Islam Indonesia bisa menerima NKRI sebagai bentuk negara dan Pancasila sebagai dasar negara setelah melalui perdebatan panjang yang melibatkan pemikiran Islam dari berbagai disiplin ilmu, terutama fiqih. Dengan demikian, mempertanyakan kembali hubungan agama dan negara apalagi menggugat bentuk dan dasar negara atas nama agama sudah tidak relevan lagi, seperti memutar balik arah jarum jam. Selain itu hal ini juga akan memancing perdebatan sia-sia yang bisa menghambat kemajuan bahkan bisa mengancam integritas bangsa

Ada kondisi memprihatinkan terkait dengan semangat nasionalisme bangsa Indonesia saat ini. Maraknya gerakan internasionalisme dalam bentuk liberalisme-kapitalisme di satu sisi dan fundamentalisme-puritanisme agama di sisi lain telah menggerus kesadaran nasionalisme warga bangsa Indonesia.

Akibat paham internasionalisme yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, hari ini kita melihat terjadi gerakan transformasi kesadaran dari citizenship menjadi netizen. Kewargaan yang dibatasi oleh identitas kenegaraan menjadi kewargaan lintas negara dan lintas geografis.

Fakta di kalangan masyarakat ini menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi anomali sosial di kalangan bangsa Indonesia. Pada masa lalu tekanan bangsa lain mampu menciptakan kesadaran kebersamaan dalam perbedaan sehingga tumbuh harga diri sebagai bangsa. Bangsa Nusantara yang beragam menggali dan menyatukan potensi sosial dan kultural yang ada untuk menghadapi tekanan dari luar. Kini tekanan dari bangsa lain justru mengancam kebersamaan dan persatuan. Ikrar sebagai bangsa dicampakkan, martabat bangsa diabaikan.

Boleh dikatakan, bahwa orang-orang pada masa lalu memiliki kesadaran kreatif menggali potensi diri untuk membangun kekuatan sendiri melawan kekuatan luar. Orang yang hidup saat ini justru hanyut dan larut dalam gerakan transnasional dengan mencampakkan potensi diri sebagai bangsa. Mereka bangga menjadi pemulung ide dan pengais sampah peradaban bangsa lain sambil mencaci maki peradaban bangsa sendiri. Mereka menggunakan pemikiran dan budaya luar untuk menghancurkan dan melemahkan budaya dan khazanah pemikiran bangsa sendiri. Lahimya sikap ini, sebab minimnya pemahaman terhadap sejarah bangsa sendiri dan miskinnya kesadaran terhadap tradisi dan budaya sendiri. Sejarah adalah referensi hidup bagi setiap bangsa. Suatu generasi yang tidak memiliki pemahaman terhadap sejarahnya sendiri ini bagaikan buih di atas gelombang lautan, sehingga mudah diombang-ambingkan keadaan dan dibohongi bangsa lain. Mereka menelan mentah-mentah setiap informasi dan pemikiran yang diberikan, tanpa *reserve* dan sikap kritis karena mereka tidak memiliki pemahaman sejarah yang bisa menjadi referensi hidup untuk mengkritisi setiap informasi dan pemikiran yang diterima dari bangsa lain.

Pada prinsipnya, tradisi adalah jangkar yang membuat suatu bangsa memiliki karakter yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah hanyut dalam pusaran arus gelombang budaya dan pemikiran bangsa lain. Oleh kafenanya, setiap bangsa yang tidak memiliki tradisi atau tidak paham terhadap budaya masyarakatnya, maka akan mudah hanyut dalam arus kebudayaan bangsa lain. Jika sudah demikian jelaslah bahwa bangsa tersebut akan keropos karena tidak memiliki kekuatan kultural dan sumber inspirasi untuk menghadapi gempuran budaya.

Berdasarkan hal di atas, maka perlu ada solusi. Maka salah satu solusinya melihat sejarah pada masa lalu, yakni lihat bagaimana para pendiri bangsa ini bisa bertahan dan berjuang untuk nasionalisme bangsa Indonesia. Mereka tidak mudah hanyut dan larut dalam pemikiran bangsa lain. Mereka itu dapat disebutkan antara lain, Ki Hadjar Dewantara, Dr Soetomo, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Sosro Kartono dan lain-lain semua belajar ke Eropa. Tetapi mereka tidak hanyut dalam budaya Eropa. Demikian juga para ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdusshomad al-Palimbani, Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Khatib al-Minangkabawi, Ha dratussyekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, semua belajar ke Arab. Tapi mereka semua tidak hanyut dalam budaya Arab. Sekalipun hidup dan berada di negara lain, para leluhur itu tetap bisa memilah mana ajaran mana pemikiran dan budaya. Ini terjadi karena mereka memiliki pemahaman sejarah dan akar tradisi yang kuat yang bisa dijadikan referensi dan pijakan dalam membangun pemikiran dan menentukan sikap. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Eropa, Amerika, Jepang, China yang tetap kokoh dan tegak spirit kebangsaannya sekalipun berada dalam pusaran arus modernisme dan globalisasi. Mereka tetap bangga dan menjaga martabat bangsanya meski telah menjadi bagian dari warga bangsa dunia maya (*netizen*). Ini karena mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarahnya sendiri dan tradisi yang mereka miliki.

Penutup

Nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Kesadaran nasional inilah yang membentuk *nation* dalam makna politik,

yaitu negara nasional. Nasionalisme dapat diartikan dengan sebuah paham yang mewujudkan loyalitas berdasarkan kesatuan tanah air, budaya dan suku.

Adapun nasionalisme Indonesia awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman penderitaan ber sama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang. Salah satu perwujudan nasionalisme adalah dibentuknya Boedi Oetomo pada tahun 1908, yang menjadi awal kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia oleh kaum cendekiawan.

Berdasarkan Q.S.al-Mumtahanah/60:8, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme menjadi sebuah anjuran dalam Islam karena merupakan bagian dari saling menghormati dan menjaga keadilan hak sesama manusia yang dilahirkan dalam satu wilayah tanah air. Selain itu nasionalisme dapat diartikan sebagai pengabdian secara utuh terhadap tempat atau negara kelahiran yang telah memberikan kehidupan lewat sumber daya alamnya. Nasionalisme pada hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per-orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membedakan baik suku, agama, maupun ras.

Endnote:

¹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Jakarta: cet. Ke-5, 2017, h. 10.

²*Ibid.* Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Indonesia berkemajuan memiliki banyak dimensi: *Pertma*, berkemajuan dalam semangat, alam pikir, perilaku dan sednantias berorientasi ke masa depan. *Kedua*, berkemajuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam kehidupan material dan spiritual. *Ketiga*, berkemajuan untuk menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Semangat inilah yang akan melahirkan nasionalisme yang kuat bagiarganya.

³*Ibid.* h. 45.

⁴*Ibi.*h. 46

⁵*ibi.*

⁶*Ibid.* h. 50.

⁷Haedar Nashir, *Kuliah Kemuhammadiyah 2* (Jogyakarta: Suara Muham madiyah, cet. Juli 2018), h. 115. Lihat juga, <https://zuriatigm.wordpress.com/2012/06/29/khittah-perjuangan-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara-khittah-denpasar-tahun-2002/>. Peran Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan *baldaun thoyyibatun wa Fabbun ghafur*.

⁸ *Ibid.* h. 116-117.

⁹Acep Zamzam Nur, Zuly Qodir, dkk , *NUhammadiyah Bicara Nasionalisme* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 133.

¹⁰wAwancara peneliti dengan Drs. Irwansyahputra, MA, Sekretaris Pimpi nan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, periode 2015-2020, pada Sabtu,13 oktober 2018.

¹¹Wawancara peneliti dengan Prof. Dr. Nawir Yusledm, MA, beliau adalah Wakil Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang embidangi Majelis Tarjih dan Tajdid, periode 2015-2020.

¹²Haedar Mashir, *Kuliah Kemuhammadiyah 2* (Jogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 205.

¹³Abdullah Ubaid dan Mohammad bakir (editor), *Nasionalisme dan Islam Nusantara* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), h. 8-9.

¹⁴Wawancara dengan peneliti dengan K.H.Maman Abd. Ghani, Senin, 30 Agustus 2018, di kantor PB NU Jakarta.

¹⁵ Wawancara dengan peneliti dengan K.H.Maman Abd. Ghani, Senin, 30 Agustus 2018, di kantor PB NU Jakarta.

¹⁶<https://tirto.id/nu-agama-dan-nasionalisme-adalah-kunci>.

¹⁷¹⁸Wawancara dengan Dr. Nisful Khairi, MA, Senin, 15 Oktober 2018..

¹⁹Wawancara dengan Prof.Dr. Katimin, M.Ag. pada Hari Selasa, 16 Oktober 2018, di Fakultas Ushuluudin dan Studi isl;am UIN SU. Beliau adalah pengurus NU Wilayah Sumatera Utara, beliau juga Dekan FUSI UIN SU Medan.

DAFTAR REFERFENSI

Nashir, Haedar, *Kuliah Kemuhammadiyah 2* (Jogyakarta: Suara Muham madiyah, cet. Juli 2018)

Nur, Acep Zamzam, Zuly Qodir, dkk , *NUhmmadiyah Bicara Nasionalisme* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*, Jakarta: cet. Ke-5, 2017.

Ubaid, Abdullah, dan Mohammad bakir (editor), *Nasionalisme dan Islam Nusantara* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015)

Wawancara dengan Dr. Nisful Khairi, MA, Senin, 15 Oktober 2018..

Wawancara dengan peneliti dengan K.H.Maman Abd. Ghani, Senin, 30 Agustus 2018, di kantor PB NU Jakarta.

Wawancara dengan peneliti dengan K.H.Maman Abd. Ghani, Senin, 30 Agustus 2018, di kantor PB NU Jakarta.

Wawancara dengan Prof.Dr. Katimin, M.Ag. pada Hari Selasa, 16 Oktober 2018, di Fakultas Ushuluudin dan Studi isl;am UIN SU. Beliau adalah pengurus NU Wilayah Sumatera Utara, beliau juga Dekan FUSI UIN SU Medan.

Wawancara peneliti dengan Drs. Irwansyahputra, MA, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, periode 2015-2020, pada Sabtu, 13 oktober 2018.

Wawancara peneliti dengan Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, beliau adalah Wakil Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang embidangi Majelis Tarjih dan Tajdid, periode 2015-2020.

Internet

<https://tirto.id/nu-agama-dan-nasionalisme-adalah-kunci>.

